





III. LAYANAN INFORMASI HUKUM

 PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG SEKRETARIAT DAERAH BAGIAN HUKUM	NOMOR SOP	SETDA.01/BAGIAN HUKUM.02/03				
	TANGGAL PEMBUATAN	30 OKTOBER 2024				
	TANGGAL REVISI	-				
	TANGGAL EFEKTIF	31 OKTOBER 2024				
	DISAHKAN OLEH	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG  Drs. ADI WARYANTO NIP. 19660304199203101007				
	NAMA SOP	LAYANAN INFORMASI HUKUM				
<b>DASAR HUKUM</b>		<b>KUALIFIKASI PELAKSANA</b>				
1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 704); 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 33) 4 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692); 5 Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2016 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 32) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 108); 6 Peraturan Bupati Magelang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Magelang (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2010 Nomor 11); dan 7 Peraturan Bupati Magelang Nomor 58 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2023 Nomor 58);		1. Memahami Peraturan Perundang-Undangan; 2. Memahami Layanan Perpustakaan JDIIH; 3. Mampu mengoperasikan komputer; 4. Cermat, teliti, tekun dan sabar.				
<b>KETERKAITAN</b>		<b>PERALATAN/PERLENGKAPAN</b>				
1. Semua SOP Bagian Hukum		1. Alat Tulis Kantor 2. Komputer, scanner				
<b>PERINGATAN</b>		<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b>				
1. Menjamin tersedianya informasi hukum sebagai Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Magelang		1. Identitas pemohon informasi 2. Informasi yang dibutuhkan				
NO	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA		MUTU BAKU		
		PEMOHON INFORMASI	PENGELOLA INFORMASI	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT
1	2	3	4	5	6	7
1	Permintaan informasi	1				
2	Permohonan via telepon, SMS, WA, email	2			5 menit	Permohonan informasi
3	Langsung bisa dipenuhi		3	Alat Tulis Kantor, komputer, telepon/smartphone, scan, fax	5 menit	informasi yang dibutuhkan
4	Mencari informasi yang dibutuhkan		4	Alat Tulis Kantor, komputer, telepon/smartphone, scan, fax	10 menit	informasi yang dibutuhkan
5	Memenuhi permintaan informasi via telepon, SMS, WA email		5	Alat Tulis Kantor, komputer, telepon/smartphone, scan, fax	5 menit	informasi yang dibutuhkan tersampaikan
6	Informasi terpenuhi	6		Alat Tulis Kantor, komputer, telepon/smartphone, scan, fax	1 menit	-
7	Selesai	7		-	-	-

Salinan sesuai dengan aslinya  
 KEPALA BAGIAN HUKUM,  
  
  
**RATNA YULIANTY, S.H., M.H.**  
 Pembina Tingkat I  
 NIP. 196807301997032003

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

ttd

Drs. ADI WARYANTO  
 Pembina Utama Madya  
 NIP. 196603041992031007